



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 28 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023**

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum)
2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Wiwit Widuri (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum)
3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum)
4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Arif Minardi (Ketua Umum) dan Idrus (Sekretaris Umum)
5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan (Sekretaris Umum)
6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie (Sekretaris Jenderal)
7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum)
8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, diwakili Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal)
9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal)
10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal)

11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal)
12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal)
13. Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, diwakili Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris)

### **PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

1. R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
2. Afif Johan sebagai Sekretaris Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
3. Indra Munaswar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI)
4. Abdul Hakim sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98)
5. Sofyan Bin Abd Latief sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP Pariwisata Reformasi)
6. Dwi Hantoro Sutomo sebagai Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat
7. Andy Wijaya sebagai Sekretaris I Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat
8. Sunandar sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP)
9. Zulkarnaen sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Pekerja Aqua Group (SPAG)
10. Muhammad Abrar Ali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
11. Bintoro Suryo Sudibyo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
12. Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba sebagai Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
13. T. Putri Kawistari sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
14. Agus Wibawa sebagai Ketua Umum Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
15. Ide Bagus Hapsara sebagai Sekretaris Jenderal Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)

### **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden (III)

**Selasa, 28 Maret 2023, Pukul 11.11 – 11.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto  
Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023:**

1. Sunarti
2. Lilis Mahmudah

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023:**

1. Muhammad Raziv Barokah
2. Caisa Aamuliadiga
3. Wigati Ningsih
4. Muhtadin
5. Alif Fachrul Rahman

### **C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023:**

1. Ari Lazuardi
2. Abu Bakar
3. Sahat Butar Butar
4. Endang Rokhani
5. Mustiyah
6. Saepul Anwar

### **D. Pemerintah:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi          | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna   | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi        | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Rian Ahmad            | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Fiqi Nana Kania       | (Kemenkopolkham)       |
| 6. Andrie Amoes          | (Kemenkumham)          |
| 7. Erni Haris            | (Kemenkumham)          |
| 8. M. Fuad Muin          | (Kemenkumham)          |
| 9. R. Tony Prayogo       | (Kemenkumham)          |
| 10. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg)          |
| 11. Mochamad Muafi       | (Kemensetneg)          |
| 12. Oryza Trivia         | (Kemensetneg)          |
| 13. Desi                 | (Kemenkeu)             |
| 14. Bagus                | (Kemenkeu)             |
| 15. Reni Mursidayanti    | (Kemnaker)             |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan untuk Perkara Nomor 14 dan Nomor 22 Tahun 2023 agendanya adalah untuk mendengar keterangan Presiden. Tetapi, ada Surat Permohonan dari Kuasa Presiden, yaitu Menko Bidang Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, yang meminta penundaan penyampaian keterangan Presiden, sehingga perkara ini belum bisa dilanjutkan. Tetapi para Pemohon hadir ya dari kedua perkara, Nomor 14 dan 22. Kemudian dari Kuasa Presiden juga hadir.

Dipersilakan Kuasa Presiden, gimana dengan surat dari Menko Perekonomian?

**2. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, menyampaikan surat Menko Perekonomian karena masih harus menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan penyampaian keterangan Presiden, maka Menko Perekonomian melalui Surat Nomor PK80/MEKOM/032023 tanggal 21 Maret 2023, meminta untuk Majelis untuk menunda penyampaian Keterangan Presiden.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [02:11]**

Baik. Jadi, belum bisa kita lanjutkan persidangan ini. Begitu, ya Para Pemohon untuk Perkara 14 maupun Nomor 22.

Oleh karena itu, sidang ini ditunda pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB**

Jakarta, 28 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

